

AUDIT DAN PEMERIKSAAN DI SEKTOR PUBLIK: PERAN STRATEGIS DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA

Moh. Afrizal Miradji ^{*1}

Kurniaga Pratiwi ²

Putri Susilowati ³

Eva Agustina ⁴

Ade Rafli Rizaldy ⁵

Ananda Cahya Adi P ⁶

^{1,2,3,4,5,6} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, Indonesia

*e-mail: afrizal@unipasby.ac.id¹, kurniagap31@gmail.com², putri07107@gmail.com³, evagustina0108@gmail.com⁴, aderaflirizaldy@gmail.com⁵, anandacahya055@gmail.com⁶

Abstrak

Audit dan pemeriksaan di sektor publik memiliki peran penting dalam memastikan pengelolaan uang negara berjalan secara jujur, bertanggung jawab, dan sesuai dengan hukum. Berbeda dengan sektor swasta, audit di sektor publik tidak hanya memeriksa kebenaran laporan keuangan, tetapi juga mengecek kepatuhan terhadap peraturan serta efektivitas kerja. Artikel ini akan secara mendalam membahas tentang konsep audit dan pemeriksaan di sektor publik, langkah-langkah dalam melakukan audit, serta cara menyajikan hasil audit tersebut. Selain itu, artikel ini juga akan memberikan contoh kasus pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah sebagai ilustrasi bagaimana audit di sektor publik dijalankan di lapangan. Dari pembahasan tersebut terlihat bahwa audit dan pemeriksaan di sektor publik sangat berguna dalam meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintahan dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan uang negara.

Kata kunci: Audit sektor publik, Pemeriksaan, Akuntabilitas, Keuangan Negara, Tata Kelola.

Abstract

Audits and audits in the public sector play a crucial role in ensuring that state funds are managed honestly, responsibly, and in accordance with the law. Unlike in the private sector, public sector audits not only verify the accuracy of financial reports but also verify compliance with regulations and operational effectiveness. This article will detail the concept of audits and audits in the public sector, the steps involved in conducting an audit, and how to present the results. Furthermore, this article will provide a case study of a local government financial report audit to illustrate how public sector audits are implemented in practice. This discussion demonstrates that public sector audits and audits are crucial for improving the quality of government management and building public trust in the use of state funds.

Keywords: Public sector audit, Examination, Accountability, State Finance, Governance.

PENDAHULUAN

Dalam sektor publik, di mana sumber daya yang digunakan berasal dari masyarakat, sehingga diperlukan tingkat akuntabilitas dan transparansi yang tinggi. Pemerintah pusat dan daerah wajib menjelaskan pengelolaan keuangan negara melalui laporan keuangan yang diperiksa oleh lembaga yang berwenang. Di Indonesia, tugas audit dan pemeriksaan sektor publik dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bertindak sebagai auditor eksternal, sedangkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berperan sebagai auditor internal.

Tujuan audit sektor publik tidak hanya mengevaluasi kebenaran laporan keuangan, tetapi juga memastikan bahwa kegiatan pemerintah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Selain itu, audit juga digunakan untuk menilai apakah pelaksanaan program pemerintah efektif dan efisien. Dengan demikian, laporan hasil audit dan pemeriksaan menjadi alat penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Artikel ini menjelaskan audit dan pemeriksaan di sektor publik secara lengkap, mencakup pengertian, proses, bentuk laporan, serta dilengkapi dengan contoh studi kasus pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah.

METODE

Penelitian ini mengambil pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode studi literatur serta studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana proses audit dan pemeriksaan berlangsung di sektor publik.

a) Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari:

1. Peraturan perundang-undangan terkait audit sektor publik;
2. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN);
3. Buku teks dan jurnal ilmiah yang relevan dengan audit sektor publik;
4. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

b) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara tertentu seperti mendaftar dan melacak berbagai dokumen resmi, laporan audit, serta hasil penelitian yang sudah dipublikasikan, yang semuanya berhubungan dengan topik penelitian tersebut.

c) Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif dan analitis, yang terdiri dari tiga tahap, yaitu: mengumpulkan dan mengelompokkan data, menganalisis isi dokumen audit dan pemeriksaan, membuat kesimpulan berdasarkan ketepatan antara teori, standar, dan praktik audit di sektor publik..

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Audit dan Pemeriksaan di Sektor Publik

Audit sektor publik merupakan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga yang independen untuk mengevaluasi pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Badan Pemeriksa Keuangan memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, termasuk pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, serta pemeriksaan yang bertujuan spesifik..

2. Jenis-Jenis Pemeriksaan Sektor Publik

Pemeriksaan di sektor publik dapat diklasifikasikan menjadi:

1. Pemeriksaan Keuangan bertujuan memberikan pendapat tentang kejelasan dan keakuratan laporan keuangan pemerintah.
2. Pemeriksaan Kinerja berfungsi mengukur aspek ekonomi, efisiensi, serta efektivitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.
3. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT), termasuk pemeriksaan investigatif dan pemeriksaan atas hal-hal tertentu sesuai kebutuhan.

3. Proses Audit dan Pemeriksaan oleh BPK

Proses audit di sektor publik biasanya terdiri dari tiga tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Pada tahap perencanaan, auditor menemukan risiko yang mungkin terjadi dan mempelajari sistem pengendalian internal pemerintah. Selama tahap pelaksanaan, auditor melakukan pemeriksaan terhadap dokumen, mengamati langsung di lapangan, dan memastikan informasi melalui konfirmasi. Tahap terakhir adalah Menyusun laporan hasil pemeriksaan yang mencakup pendapat, temuan, kesimpulan, serta rekomendasi tindak lanjut.

4. Studi Kasus: Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sebagai contoh, Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebuah kabupaten.. Hasilnya menunjukkan bahwa pemerintah daerah menerima opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) karena adanya kelemahan dalam pengelolaan aset tetap serta ketidakpatuhan terhadap prosedur pengadaan barang dan jasa. Pada temuan tersebut disertai rekomendasi agar pemerintah daerah memperbaiki pencatatan aset dan meningkatkan kepatuhan terhadap aturan pengadaan.

Studi kasus ini menunjukkan bahwa pemeriksaan di sektor publik tidak hanya berfungsi sebagai sarana evaluasi, tetapi juga sebagai cara untuk memberikan bimbingan agar bisa meningkatkan pengelolaan tata kelola dan sistem pengendalian internal pemerintah daerah.

5. Dampak Audit dan Pemeriksaan terhadap Tata Kelola Pemerintahan

Hasil Hasil audit dan pemeriksaan berdampak besar terhadap peningkatan akuntabilitas dan transparansi. Tindak lanjut rekomendasi secara efektif mampu memperbaiki sistem pengendalian intern dan mencegah terjadinya penyimpangan di masa depan.

KESIMPULAN

Laporan audit dan pemeriksaan di sektor publik berperan penting dalam memastikan pengelolaan uang negara dilakukan secara jujur dan terbuka. Dengan melakukan pemeriksaan keuangan, penilaian kinerja, serta pemeriksaan yang memiliki tujuan khusus, peran auditor di sektor publik membantu meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintahan. Dari studi kasus pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), terlihat bahwa hasil dari audit dapat digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki pengelolaan keuangan secara terus-menerus. Laporan audit dan pemeriksaan merupakan alat penting dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas baik di sektor swasta maupun publik. Audit berfokus pada memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan, sedangkan pemeriksaan memiliki lingkup yang lebih luas, seperti pengecekan kepatuhan dan penilaian kinerja. Proses yang terstruktur dan penyampaian laporan yang jelas akan menambah kualitas informasi yang diberikan. Dengan demikian, Laporan audit dan pemeriksaan yang berkualitas dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat dan meningkatkan pengelolaan organisasi secara lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S. (2019). *Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2020). *Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach*. Pearson Education.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan*.
- Republik Indonesia. (2011). *Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)*. Jakarta: BPK RI.